

Penentuan Faktor Prioritas Penganggaran Partisipatif IKM Andalan Provinsi Kalimantan Barat dengan Metode AHP

Susana Evayanti
Magister Teknik Sistem
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
susanaakep@gmail.com

Nur Aini Masruroh
Departemen Teknik Mesin dan Industri
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
aini@ugm.ac.id

Niken Siwi Pamungkas
Magister Teknik Sistem
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
Niken011100291@gmail.com

Anna Maria Sri Asih
Departemen Teknik Mesin dan Industri
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
amsriasih@ugm.ac.id

Abstrak—Harapan dari penelitian ini adalah mengetahui aspek prioritas dalam penentuan IKM (Industri Kecil Menengah) andalan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dalam penganggaran partisipatif oleh Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD). Masalah yang dialami adalah sulitnya menentukan IKM terbaik terkait IKM andalan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi pilihan. Metode AHP dapat menjadi cara dalam proses pengambilan keputusan terhadap masalah kompleks yang belum terstruktur menjadi terstruktur. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek ekonomi, sosial dan budaya, teknis, dan manajemen. Data diperoleh dengan menyebar kuesioner. Dari hasil kuesioner dilakukan perhitungan konsistensi rasio (CR). Jika nilai $CR \leq 0,10$ maka dapat disimpulkan responden telah menjawab secara konsisten dan selanjutnya dilakukan perhitungan dengan metode AHP. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, kriteria utama berturut-turut yaitu teknis (0.387), ekonomi (0.316), manajemen (0.154), dan sosial dan budaya (0.065)

The hope of this research is to determine the priority aspects in determination of the mainstay SMEs of Industry and Trade Department of West Kalimantan Province in the participatory budgeting by the Regional Budgeting Team (TPAD). The problem that occurred is the difficulty of determining the best SMEs related to the mainstay SMEs because of many factors that influence the choices. The AHP method can be an alternative method in the process of achieving a complex problem that has not yet been structured into structured. The criteria in this research are economic, social and culture, technical, and management. Data were obtain by spreading questionnaires. From the result of the questionnaire, then calculated the Consistency Ratio (CR). If the value of $CR \leq 0,10$ then it can be concluded the respondents' have answered consistently and the calculation by AHP methode can be calculated. From the research results can be concluded, the main criteria are technical (0.387), economic (0.316), management (0.154), and social and culture (0.065).

Kata kunci—*Penganggaran Partisipatif, Analytical Hierarchy Process (AHP), IKM Andalan*

I. PENDAHULUAN

Penganggaran partisipatif telah menjadi suatu alat untuk memfasilitasi dan mempertimbangkan partisipasi publik dalam proses penganggaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyadari pentingnya pengambilan keputusan yang tepat terkait penganggaran partisipatif dalam pembangunan ekonomi baik secara makro maupun mikro karena hal ini memungkinkan masyarakat untuk berperan dalam penentuan penganggaran lokal, kabupaten/kota, dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai prioritas pembangunan, membantu dalam mengintegrasikan komunitas lokal dan memotivasi mereka untuk bekerja sama, serta mengedukasi warga negara mengenai belanja daerah, proses penganggaran dan keterbatasan anggaran.

Proses penganggaran partisipatif di Indonesia melalui beberapa tahapan, dimulai dengan musyawarah membangun tingkat kelurahan, musyawarah membangun tingkat kecamatan, musyawarah membangun tingkat kabupaten/kota, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pembahasan RAPBD, dan pengesahan APBD. Metode berjenjang yang dimulai dari tingkat bawah ke atas (*bottom-up*) ini menyebabkan banyak usulan yang terjaring sehingga dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang komprehensif dalam proses seleksi agar diperoleh solusi yang tepat.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah penganggaran partisipatif Industri Kecil dan Menengah (IKM) andalan yang berada di bawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar dengan mempertimbangkan besarnya peranan IKM dalam

pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data Kemenkop dan Usaha Kecil Menengah (2013) jumlah tenaga kerja yang terserap oleh Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) rata-rata sebesar 96,99%, dan kontribusi rata-rata UMKM terhadap PDB sebesar 60,34%. IKM yang merupakan bagian dari UMKM memiliki peranan cukup signifikan pada perkembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Barat. Namun karena jumlah anggaran yang terbatas, serta jumlah IKM-IKM baru yang tumbuh setiap tahunnya, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memerlukan proses seleksi dan solusi yang tepat pula.

Proses seleksi merupakan titik terpenting sebagai alat yang menjanjikan dalam tata kelola perbaikan penganggaran. Dimana penganggaran menjadi lebih terstruktur dengan menetapkan parameter dan kriteria sebagai tolak ukur dalam proses seleksi. Pengambil keputusan pada penganggaran partisipatif di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melibatkan *stakeholder* yang menjadi anggota dalam TPAD (Tim Penyusunan Anggaran Daerah). TPAD harus lebih cermat dalam memilih IKM andalan yang akan menjadi penerima anggaran partisipatif agar sasaran pembangunan ekonomi dan daerah dapat tercapai.

Enam IKM andalan yang menjadi alternatif untuk menjadi prioritas dalam penganggaran yaitu IKM Pengolahan Lidah Buaya, IKM Keramik Hias, IKM Tenun Songket, IKM Anyaman Bidai, IKM Tenun Ikat, dan IKM Olah Ikan.

Meskipun partisipasi warga dalam proses penganggaran publik telah menerima perhatian selama beberapa dekade, penelitian di bidang ini masih memiliki keterbatasan yang signifikan [1]. Diperlukan penggabungan fitur-fitur yang dianggap penting dalam literatur yang berkembang tentang varian penganggaran partisipatif di seluruh dunia, namun diakui Grillos bahwa masih terbatasnya informasi yang dapat ditemukan tentang penganggaran partisipatif dalam ilmu pengetahuan yang ada [2].

Keberhasilan penganggaran partisipatif harus disesuaikan dengan realitas konstektual sehingga dalam pelaksanaannya, keputusan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pejabat publik dan administrator. Hanya dengan menyadari pola tersebut dan menyesuaikan program dengan kenyataan ini, pejabat publik dan administrator dapat memastikan bahwa penganggaran partisipatif mencapai tujuan terpuji, terutama berkenaan dengan kemajuan keadilan sosial.[3]

Kesenjangan kedua adalah bahwa desain penganggaran partisipatif dan kondisi di mana ia diperkenalkan belum dikaitkan secara teoritis. Meskipun banyak ahli menyarankan secara umum bahwa desain penganggaran partisipatif harus disesuaikan dengan keadaan lokal, ada sedikit teori tentang bagaimana konteks mempengaruhi desain [4]. Namun, pertumbuhan penganggaran partisipatif yang mendadak dan dinamis telah meningkatkan kebutuhan akan sistem pengambilan keputusan di bidang ini [5].

Model penganggaran partisipatif lebih disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing wilayah. Dalam tatanan nasional, maka model ini juga harus disesuaikan dengan sistem politik dan sistem perencanaan pembangunan

yang berlaku [6]. Metode AHP dapat diaplikasikan pada masalah kebijakan publik, strategi politik, dan perencanaan [7].

Saat ini, penganggaran di Indonesia menganut sistem penganggaran setelah reformasi keuangan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana pemerintah dapat mendesain sistem penganggaran yang lebih efektif dalam pengalokasiannya, efisien dalam pelaksanaannya, akuntabel, transparan, dan lebih mengedepankan pencapaian target kebijakan yang terukur dalam melakukan pengeluaran anggaran [8]. Penganggaran partisipatif merupakan salah satu alat dalam mencapai tujuan tersebut.

Penelitian mengenai penganggaran partisipatif terhadap IKM belum pernah dilakukan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyadari pentingnya suatu sistem pengambilan keputusan yang komprehensif terkait penganggaran partisipatif IKM andalan.

Penelitian mengenai penganggaran pernah dilakukan oleh Wahyudiana [9] yaitu penentuan prioritas pemeliharaan jalan kabupaten berdasarkan ketersediaan alokasi dana. Sebagai alat bantu pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan metode AHP.

Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) tepat digunakan karena AHP memiliki sejumlah kelebihan. Diantaranya, memiliki kemampuan untuk memodelkan masalah yang tidak terstruktur, menyelesaikan masalah terukur (kuantitatif) maupun pendapat (*judgement*) serta telah diakui memiliki tingkat kesahihan/akurasi yang tinggi [10]. Selain itu, hasil metode AHP dalam bentuk bobot, mempermudah pengambil keputusan dalam memilih IKM andalan yang akan menjadi prioritas penganggaran.

II. LANDASAN TEORI

A. Penganggaran Partisipatif

Penganggaran partisipatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana warga negara, baik secara individu atau melalui asosiasi sipil dapat secara sukarela dan teratur berkontribusi terhadap pembuatan keputusan setidaknya sebagian dari anggaran publik melalui serangkaian pertemuan terjadwal tahunan dengan pejabat pemerintah [4].

Sejak awal, penganggaran partisipatif dimaksudkan untuk berpihak kepada masyarakat miskin dan memegang redistribusi sebagai tujuan utama, namun keragaman institusi partisipatif modern dipandang sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan termasuk peningkatan kesinambungan, skalabilitas, daya tanggap, pemberian layanan, dan kemampuan warga negara [11]

B. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP, yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty, merupakan salah satu metode khusus dari *Multi Criteria Decision Making* (MCDM). AHP dapat diterapkan dalam suatu proses pengambilan keputusan dari masalah-masalah yang rumit, seperti perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan kebijaksanaan, optimasi, dan

pemecahan konflik [12]. AHP sendiri bertujuan untuk membuat peringkat alternatif keputusan sehingga pada kasus multi kriteria dapat dipilih salah satu alternatif yang terbaik.

Cara kerja Metode AHP adalah dengan memecah-mecah (*break down*) suatu situasi atau kriteria yang kompleks dan tak terstruktur menjadi bagian-bagian terkecil dari komponennya hingga tidak dapat dipecah lagi. Selanjutnya menyusun bagian/variabel ke dalam suatu hierarki dan diberi nilai numerik untuk tiap pertimbangan subyektif tentang tingkat pentingnya suatu variabel. Terakhir, dengan melakukan sintesis terhadap pertimbangan yang ada dan menetapkan variabel dengan nilai prioritas paling tinggi [13]

C. Prinsip AHP

Beberapa prinsip dasar AHP yang harus dipahami dalam menyelesaikan permasalahan yaitu: [13]

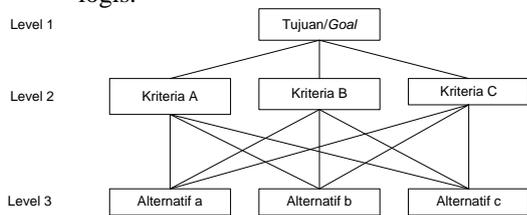
1. Hirarki

Merupakan langkah awal guna menyederhanakan masalah yang dihadapi menjadi bagian-bagian elemen pokoknya, kemudian dipecah lagi menjadi bagian-bagian sub elemennya secara hirarki, sehingga mempermudah para pengambil keputusan untuk menganalisis dan menyimpulkan permasalahan tersebut.
2. Penentuan Prioritas

Penentuan prioritas dilakukan dengan membandingkan secara berpasangan antar dua elemen pada level yang sama berdasarkan hirarki yang telah dibuat. Kedua elemen pada level yang sama dibandingkan dengan mempertimbangkan tingkat preferensi elemen yang satu terhadap elemen yang lain oleh pengambil keputusan.
3. Konsistensi

Konsistensi dibutuhkan karena merupakan prinsip rasional dalam AHP. Konsistensi artinya:

 - a. Objek dikelompokkan menurut homogenitas dan relevansinya.
 - b. Relasi antar objek saling membenarkan secara logis.



Gambar 1. Hirarki metode AHP [13]

D. Matrik Perbandingan Berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan merupakan langkah awal dalam menentukan urutan prioritas dari tiap elemen. Matriks diisi berdasarkan preferensi dengan mengacu pada Tabel 1.

TABEL 1. SKALA AHP

Perbandingan antar kriteria	Definisi penilaian	Keterangan
1	sama penting	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama

Perbandingan antar kriteria	Definisi penilaian	Keterangan
3	Relatif lebih penting	Pengalaman dan penilaian sedikit lebih memihak satu elemen
5	lebih penting	Pengalaman dan penelitian sangat memihak satu elemen lainnya
7	sangat penting	Satu elemen sangat disukai
9	mutlak lebih penting	Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai
2,4,6,8	Nilai-nilai antara	Bila terdapat keraguan di antara dua tingkat yang berdekatan

Sumber: [14]

Jika suatu sub sistem operasi memiliki n elemen operasi yaitu A1, A2,...,An maka perbandingan berpasangan dari elemen operasi tersebut membentuk matriks A berukuran n x n seperti pada Gambar 2.

	A1	A2	...	An
A1	1	a12	...	a1n
A2	a21	1	...	a2n
...
An	an1	an2	...	1

Gambar 2. Matriks perbandingan berpasangan [15]

E. Weight

Weight diperoleh dengan membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Perhitungan *geometric mean* menggunakan persamaan:

$$GM = \sqrt[n]{x_1 x_2 x_3 \dots x_n} \tag{1}$$

Dimana:

- GM : *Geometric mean*
- n : Jumlah elemen
- X1 : Nilai elemen pada kolom 1
- Xn : Nilai elemen pada kolom ke n

F. Konsistensi Matriks Perbandingan Berpasangan

Perhitungan ini dilakukan pada atribut utama dari kerangka hirarki. Jika nilai CR ≤ 0,10, maka konsistensi penilaian yang dilakukan secara umum dinilai baik atau dapat diterima untuk dilakukan pada matrik berikutnya yang terdapat pada level yang lebih rendah. Menghitung indeks konsistensi (*consistency index*) dengan persamaan berikut:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \tag{2}$$

Dimana:

- CI : *Consistency Index*
- λmax : *Eigen value*
- n : Banyaknya elemen yang dibandingkan

$$CR = \frac{CI}{RI} \tag{3}$$

Dimana:

CR : *Consistency Ratio*

CI : *Consistency Index*

RI : *Random Index*

Berikut tabel nilai indeks random

TABEL 2. INDEKS RANDOM

n	1,2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0,58	0,9	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4
		0	2	4	2	1	5	9	

Sumber: [13]

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekumpulan data dengan karakteristik sejenis yang dijadikan sumber/objek penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian yang diambil mewakili populasi untuk keperluan penelitian. Jumlah sampel disebut juga dengan ukuran sampel [16]. Sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili 100% populasi sehingga tidak terjadi kesalahan generalisasi. Sampel yang dapat mewakili suatu populasi secara tepat berjumlah sama dengan populasi itu sendiri. Sampel pada penelitian ini adalah anggota TPAD yang terlibat dalam pengambilan keputusan penganggaran partisipatif IKM andalan. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *saturating sampling* yaitu suatu metode *sampling* yang melibatkan semua anggota populasi menjadi sampel dalam penelitian.

B. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sbb:

1. Idefinisi dan penguraian masalah kriteria yang dijadikan prioritas dalam pemilihan IKM andalan
2. Pembuatan hirarki. Untuk kriteria IKM andalan diambil empat kriteria utama berdasarkan RPJMD yaitu ekonomi, sosial dan budaya, teknis, dan manajemen.
3. Penyebaran kuesioner kepada 6 responden yang merupakan anggota TPAD IKM andalan.
4. Penyusunan matriks perbandingan berpasangan dari tiap responden pada setiap level kriteria, sub kriteria, dan alternatif.
5. Penghitungan vektor prioritas masing-masing elemen-elemen pada tiap kriteria, sub kriteria dan alternatif dalam hirarki. Vektor prioritas dilakukan dengan menghitung nilai *eigen vector*.
6. Perhitungan *eigen* maksimal
7. Pengujian konsistensi tiap matriks perbandingan berpasangan.
 - Menghitung CI (persamaan 1)
 - Menghitung CR (persamaan 2)
8. Pengambilan keputusan
 - Menghitung rata-rata geometrik untuk setiap kriteria dan sub kriteria.

C. Hasil dan Analisis

1. Penyusunan Hirarki

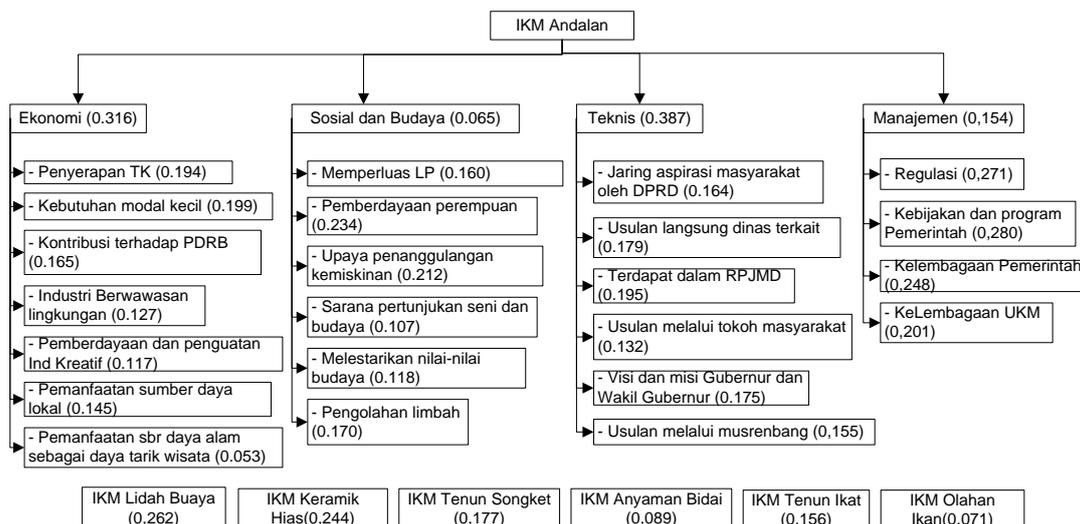
Aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan IKM andalan terbaik menggunakan 4 kriteria utama yang diperoleh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2018. Adapun 4 kriteria utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi (E)
Kriteria ekonomi terdiri dari 7 subkriteria, yaitu penyerapan tenaga kerja (E1), kebutuhan modal kecil (E2), kontribusi terhadap PDRB (E3), industri berwawasan lingkungan (E4), pemberdayaan dan penguatan industri kreatif (E5), memanfaatkan sumber daya lokal (E6), dan memanfaatkan potensi alam sebagai potensi wisata (E7).
- b. Sosial dan Budaya (S)
Kriteria sosial budaya meliputi 6 sub kriteria yaitu memperluas lapangan pekerjaan (S1), pemberdayaan perempuan (S2), upaya penanggulangan kemiskinan (S3), sarana pertunjukan seni dan budaya (S4), melestarikan nilai-nilai budaya lokal (S5), pengolahan limbah (S6).
- c. Teknis (T)
Kriteria teknis meliputi 6 subkriteria yaitu jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD (T1), usulan langsung dinas terkait (T2), terdapat dalam RPJMD (T3), usulan melalui tokoh masyarakat (T4), visi dan misi gubernur dan wagub (T5), dan usulan melalui musrenbang (T6).
- d. Manajemen (M)
Kriteria manajemen meliputi 4 subkriteria yaitu regulasi (M1), kebijakan dan program pemerintah (M2), kelembagaan pemerintah (M3), dan kelembagaan UKM (M4).

Alternatif IKM yang menjadi pilihan dalam penelitian ini adalah 6 IKM andalan yang berada di bawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Enam alternatif ini dipilih dari 14 IKM andalan yang ada dan yang melakukan seleksi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar pada wawancara awal sebelum melakukan penyusunan kuesioner.

2. Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Empat kriteria utama yang terdapat dalam hirarki yaitu ekonomi (E), sosial dan budaya (S), teknis (T), dan manajemen (M), sehingga keempat elemen ini harus



Gambar 3. Bobot prioritas dengan metode AHP

TABEL 4. MATRIKS NILAI BOBOT DAN EIGEN VALUE RESPONDEN

Kriteria	E	S	T	M	Geometric mean	Normal weight	λ
E	1,00	7,00	1,00	7,00	2,65	0,47	1,93
S	0,14	1,00	0,25	0,33	0,33	0,06	0,25
T	1,00	4,00	1,00	5,00	2,11	0,38	1,56
M	0,14	3,00	0,20	1,00	0,54	0,10	0,41
Jumlah	2,29	15,00	2,45	13,33	5,63	1,00	4,15

dibandingkan. Perhitungan perbandingan berpasangan antar ke empat kriteria adalah sbb:

1. Penyusunan matriks perbandingan berpasangan Responden 1

TABEL 3. MATRIKS PERBANDINGAN BERPASANGAN RESPONDEN 1

Kriteria	E	S	T	M
E	1,00	7,00	1,00	7,00
S	0,14	1,00	0,25	0,33
T	1,00	4,00	1,00	5,00
M	0,14	3,00	0,20	1,00
Jumlah	2,29	15,00	2,45	13,33

2. Perhitungan nilai consistency ratio dan nilai akhir kriteria IKM andalan

- a. Geometric mean

$$GMEkon = \sqrt[4]{1 \times 7 \times 1 \times 7} = 2,65$$

- b. Normalize weight

$$Normalize\ Weight\ Ekon = \frac{2,65}{5,63}$$

- c. Eigen Vector

$$\lambda Ekon = (1 \times 0,47) + (7 \times 0,06) + (1 \times 0,38) + (7 \times 0,10) = 1,93$$

- d. Consistency Index (CI)

$$CI = \frac{4,15 - 4}{4 - 1} = 0,05$$

- e. Consistency Ratio (CR)

$$CR = \frac{0,05}{0,9} = 0,06$$

Jika nilai $CR \leq 0.1$ maka dapat disimpulkan bahwa matriks perbandingan berpasangan konsisten yang artinya pengelompokan semua elemen telah homogen dan relasi antara kriteria secara logis saling membenarkan. Hasil perhitungan untuk responden 1 dapat dilihat pada Tabel 4.

Langkah yang sama dilakukan pada semua subkriteria dan alternatif yang ada. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis bobot prioritas dengan menggunakan metode AHP ditunjukkan oleh Gambar 3.

Dari hasil perhitungan AHP menunjukkan bahwa kriteria teknis merupakan kriteria terpenting dibandingkan kriteria lainnya. Oleh karena itu, kriteria teknis adalah faktor kunci yang harus dipertimbangkan oleh pengambil

keputusan dalam penganggaran. Sedangkan kriteria dengan nilai terkecil adalah sosial dan budaya. Hal ini diprediksi dikarenakan kriteria sosbud belum menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam penilaian.

Subkriteria regulasi dan kebijakan dan program pemerintah memiliki nilai tertinggi yang sama di bawah kriteria manajemen. Hal ini menunjukkan walaupun manajemen bukan kriteria dengan bobot tertinggi namu, pengambil keputusan menilai bahwa dua subkriteria ini merupakan faktor kunci yang juga harus dipertimbangkan dalam penganggaran. Sedangkan subkriteria pemanfaatan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata yang berada di bawah kriteria ekonomi memiliki nilai terendah. Hal ini diprediksi dikarenakan subkriteria ini juga belum menjadi pertimbangan pengambil keputusan.

Alternatif IKM Lidah Buaya memiliki nilai tertinggi dibandingkan alternatif lain. sehingga pengambil keputusan dapat memprioritaskan pengambilan anggaran berdasarkan urutan perengkangan AHP.

D. Kesimpulan

Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait IKM andalan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengacu pada RPJMD 2013-2018 Pemprov Kalbar adalah Ekonomi (penyerapan tenaga kerja, kebutuhan modal kecil, kontribusi terhadap PDRB, industri berwawasan lingkungan, pemberdayaan dan penguatan industri kreatif, pemanfaatan sumber daya lokal, memanfaatkan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata), Sosial dan budaya (memperluas lapangan pekerjaan, pemberdayaan perempuan, upaya penanggulangan kemiskinan, sarana pertunjukan seni dan budaya, melestarikan nilai-nilai budaya, pengolahan limbah, Teknis (jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, usulan langsung dinas terkait, terdapat dalam RPJMD, usulan melalui tokoh masyarakat, visi dan misi gubernur dan wakil gubernur, usulan melalui musrenbang), dan manajemen (regulasi, kebijakan dan program pemerintah, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan UKM)..

Urutan alternatif terbaik menurut metode AHP yaitu IKM Lidah Buaya dengan nilai 0.262, IKM Keramik Hias dengan nilai 0.244, IKM Tenun Songket dengan nilai 0.177, IKM Tenun Ikat dengan nilai 0.156, IKM Anyaman Bidai dengan nilai 0.089, dan IKM Olahan Ikan dengan nilai 0.071.

REFERENSI

- [1] Y. Wu and W. Wang, "The rationalization of public budgeting in China: a reflection on participatory budgeting in Wuxi," *Public Financ. Manag.*, vol. 11, no. 3, pp. 262–283, 2011.
- [2] T. Grillos, "Participatory Budgeting and the Poor: Tracing Bias in a Multi-Staged Process in Solo, Indonesia," *World Dev.*, vol. 96, pp. 343–358, 2017.
- [3] M. Castillo, "Reflections on Participatory Budgeting in New York City," *Innov. J.*, vol. 20, no. 2, pp. 1–12, 2015.
- [4] B. Goldfrank, "Lessons from Latin American experience in participatory budgeting," *Particip. Budg.*, no. March, pp. 91–126, 2007.

- [5] D. Walczak and A. Rutkowska, "Project rankings for participatory budget based on the fuzzy TOPSIS method," *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 260, no. 2, pp. 706–714, 2017.
- [6] Pusat Kajian Anggaran, "Penganggaran Partisipatif dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Utang Luar Negeri dan Dampaknya terhadap Perekonomian," vol. I, 2016.
- [7] M. Velasquez and P. T. Hester, "An Analysis of Multi-Criteria Decision Making Methods," *Int. J. Oper. Res.*, vol. 10, no. 2, pp. 56–66, 2013.
- [8] BPK RI, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara," vol. 26, no. 5, pp. 1–40, 2008.
- [9] Wahyudiana, "Penentuan Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten Berdasarkan Ketersediaan Alokasi Dana (Studi Kasus Jalan Kabupaten di Kabupaten Tulungagung)," 2009.
- [10] A. Khairina, "Bab 4," *Identifikasi Produk/Komoditas Unggulan*, no. 2001, pp. 38–55, 2009.
- [11] G. Mansuri and V. Rao, "Community Based (and Driven) Development: A Critical Review," pp. 1–55, 2003.
- [12] Thomas L. Saaty, *The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [13] Thomas L. Saaty, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dan Situasi yang Kompleks*. Jakarta: Pustaka Binama Pressindo, 1993.
- [14] Thomas L. Saaty, "How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process," *European Journal of Operational Research*, vol. 48, pp. 9–26, 1990.
- [15] Tominanto, "Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Penentuan Prestasi Kinerja Dokter Pada RSUD Sukoharjo," *Infokes*, vol. 2, no. Tominanto, pp. 1–15, 2012.
- [16] Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.